



# LAMPUNG SAI

MARET 2021 EDISI 3



## LIPUTANKHUSUS

- Kanwil Lampung Adakan Promosi dan Diseminasi Paten Sekaligus Penandatanganan MoU
- Kanwil Lampung Gelar Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021

## TOPIK UTAMA

- Kakanwil Terima Audiensi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung
- Kakanwil Lantik PAW anggota MPDN dan Buka Rapat Koordinasi MPW - MPD Notaris se-Provinsi Lampung

# Sambutan Kakanwil



**DANAN PURNOMO**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

Assalamualaikum Wr. Wb.,  
Salam Sejahtera untuk kita semua,  
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat terus berkarya, bekerja secara PASTI serta memberikan pelayanan yang prima.

Tanpa terasa Triwulan I telah dilalui, semangat membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan semakin PASTI. E-Buletin edisi ke-3 ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat luas semakin mengenal dan mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mensukseskan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini, kabar baiknya vaksinasi sudah mulai dilakukan. Untuk itu mari kita dukung upaya pemerintah dalam melawan Covid-19 ini dengan turut serta mengikuti vaksin dan terus menjalankan protokol kesehatan. Jangan takut untuk vaksin dan semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,  
Wassalamualaikum Wr. Wb.  
Salam Pembaharuan!



## **PELINDUNG**

Kepala Kantor Wilayah  
DANAN PURNOMO

## **PENGARAH**

Kepala Divisi Administrasi  
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM  
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian  
HASANUDIN

Kepala Divisi Pemasarakatan  
FARID JUNAEDI

## **PENANGGUNGJAWAB**

Kepala Bagian Program dan Humas  
BASNAMARA

## **PEMIMPIN REDAKSI**

Kasubag Humas RB & TI  
ARLISA NOVIRIANTONO

## **EDITOR**

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA  
WIRATAMA, REZA KHAIKUL FITRA,  
PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA  
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

## **FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA**

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA  
WIRATAMA, REZA KHAIKUL FITRA,  
PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA  
WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

## **LAYOUT & DESAIN GRAFIS**

NABIL AN NAFIS

# Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-3 ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratamadan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan. Pada edisi E-Buletin yang ke-3 ini, kami telah merangkum kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Khusus dalam edisi ini, kami menyajikan liputan mengenai Audiendi DPD Partai Demokrat, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung Tahun 2021. Selain itu, sebagai wujud dukungan kami kepada pemerintah dalam melawan pandemi covid-19, kami juga menyajikan liputan mengenai kegiatan vaksinasi yang dilakukan dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.



# DAFTAR ISI



**HAL. 6**

**KAKANWIL TERIMA AUDIENSI DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG**



**HAL. 17**

**KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG GANDENG TIM PENYULUH HUKUM ADAKAN SOSIALISASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020**



**HAL. 19**

**KANWIL LAMPUNG FASILITASI NASKAH AKADEMIK DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**

Kakanwil Terima Audiensi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung ..... 6

Kakanwil Terima Kunjungan Kepala BPKP Perwakilan Lampung ..... 7

Kunjungan Kerja ke Lapas Way Kanan, Kakanwil Kuatkan Tugas dan Fungsi ASN ..... 8

Kakanwil Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda ..... 9

Kepala BPKP Perwakilan Lampung Berikan Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko Tahun Anggaran 2021 di Jajaran Kantor Wilayah ... 10

Kakanwil Tinjau Langsung Lapas Gunung Sugih dan LPKA Bandar Lampung ..... 12

Kakanwil Kumham Lampung Buka Program Rehabilitasi Narkotika dan Pelatihan Kemandirian bagi WBP LPP Kelas IIA Bandar Lampung ..... 13

Beri Penguatan di Rutan Menggala, Kakanwil Berpesan Niatkan Membangun Zona Integritas untuk Memberi Pelayanan kepada Masyarakat ..... 15

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Gandeng Tim Penyuluh Hukum Adakan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 ..... 17

Kanwil Lampung Fasilitasi Naskah Akademik Dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat ..... 19

Kanwil Lampung Ikuti FGD, Menkumham Himbau Peran Serta Kanwil Untuk Memajukan Bisnis dan HAM ..... 20



**KANWIL LAMPUNG GELAR RAPAT KOORDINASI TIMPORA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**



**KAKANWIL LANTIK PAW ANGGOTA MPDN DAN BUKA RAPAT KOORDINASI MPW - MPD NOTARIS SE-PROVINSI LAMPUNG**



**KANWIL LAMPUNG DAMPINGI KEGIATAN MONEV TIM BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA**

Kanwil Lampung Gelar Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021..... 22

Kanwil Lampung Adakan Promosi dan Diseminasi Paten Sekaligus Penandatanganan MoU ..... 24

Kanwil Lampung Lakukan Upaya Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH..... 27

Kakanwil Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahap 2 di Lapas Kalianda..... 29

Gelar Pembinaan Satgas Kamtib UPT Pemasarakatan, Kanwil Lampung Hadirkan Narasumber HIMPSI dan Poltekkes..... 30

Kakanwil Lantik PAW anggota MPDN dan Buka Rapat Koordinasi MPW - MPD Notaris se-Provinsi Lampung ..... 32

Kadivmin Berikan Piagam Penghargaan Kepada Pegawai Teladan Kanwil Kemenkumham Lampung..... 34

Kanwil Lampung Dampingi Kegiatan Monev Tim Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama ..... 35

Paguyuban Ibu-Ibu Pemasarakatan (PIPAS) Lampung Selenggarakan Pertemuan Rutin Secara Virtual ..... 37

Layanan Eazy Passport Imigrasi Sasar Kampus Iib Darmajaya Lampung ..... 38



**KARYA PIKIR HAL. 40**

**Strategi Implementasi Kepatuhan Internal**  
**Dalam Rangka Peningkatan Kinerja**  
 oleh Ida Asep Somara





# KAKANWIL TERIMA AUDIENSI DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG



*Kakanwil terima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung*

**K**antor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menerima Permohonan Audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung. Selasa (09/03/2021). Sebanyak 35 orang Anggota DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Provinsi Lampung mengikuti kegiatan acara di Aula Kantor Wilayah Lampung. Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo membuka jalannya audiensi pada kegiatan hari ini yang didampingi oleh

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan serta beberapa Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas. Danan menyampaikan bahwa pada dasarnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bersikap transparansi dan terbuka kepada-

da masyarakat dengan menerima segala bentuk aspirasi dari organisasi, Lembaga, atau partai manapun.

Selanjutnya DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung yang diawali oleh Sekretaris DPD menyampaikan maksud dan tujuan audiensi serta pernyataan sikap dari DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Dilanjutkan dengan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung menyampaikan sikap DPD dan DPC Se-Provinsi Lampung tetap solid.

Diakhir kegiatan audiensi ini, secara resmi Kepala Kantor Wilayah menerima dokumen berupa AD/ART, kepengurusan, dan dokumen pernyataan sikap dari DPD dan DPC Partai Demokrat Se-Provinsi Lampung. •



## KAKANWIL TERIMA KUNJUNGAN KEPALA BPKP PERWAKILAN LAMPUNG



*Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi Terima Kunjungan Kepala BPKP di Ruang Kerjanya*

Selasa (02/03), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara serta Kepala Bagian Program & Pelaporan, Basnamara menyambut hangat kunjungan kerja Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Sumitro dan rombongan di Ruang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung. Dalam kesempatan ini, Danan Purnomo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh Kepala BPKP Perwakilan Lampung beserta rombongan. Danan meminta kerjasama dari BPKP untuk melakukan bimbingan teknis terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penyusunan Manajemen Resiko mengingat Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Lampung akan segera mengadakan sosialisasi terkait hal tersebut dalam waktu dekat. Danan juga berharap dengan terlaksananya pertemuan ini dapat mempererat silaturahmi sekaligus untuk menjalin kerjasama yang lebih baik untuk meningkatkan tata kelola menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel.

Selanjutnya, Sumitro menyampaikan bahwa BPKP siap membantu memberikan bimbingan pengelolaan keuangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta penyusunan Manajemen Resiko. Menutup pertemuan, Sumitro mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang diberikan serta berharap dengan adanya pertemuan ini dapat tercipta sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan BPKP Perwakilan Lampung. •



*Foto Bersama Kakanwil dengan Kepala BPKP beserta jajaran*





## KUNJUNGAN KERJA KE LAPAS WAY KANAN, KAKANWIL KUATKAN TUGAS DAN FUNGSI ASN



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo, didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hadiyanto melakukan Kegiatan Kunjungan kerja terkait tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Rabu (03/03/2021) Kedatangan Danan dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Way Kanan, Syarpani di Ruang Aula Dr. Sahardjo, S.H.

Dalam menyampaikan penguatan tugas dan fungsi ASN Danan kembali mengingatkan bahwa beberapa waktu yg lalu Kantor Wilayah dengan UPT telah melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan ZI, dan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Tahun 2021. "Saya harapkan action plan dapat terpenuhi dan tepat pada waktunya. Untuk ZI WBK WBBM, atensi untuk kalapas agar dapat mempersiapkan persiapan lolos TPN dan segera bentuk pokja sesuai dengan tanggungjawabnya." jelas Danan.

Danan melanjutkan setelah menyelesaikan tim pokja agar segera meminta pendampingan kepada kantor wilayah untuk penyelesaian lke dan persyaratan untuk persiapan usulan menuju wbk. Terkait dengan rakernis, ada 3 hal perintah dari dirjenpas Deteksi dini gangguan kamtib, berbicara tentang sdm agar memiliki

integritas dan kepedulian terhadap lapas. Agar semua sdm lapas way kanan dapat meningkatkan kepedulian nya terhadap lapas. Untuk yg berjaga tingkatkan kedisiplinan, kecermatan. Bangun komunikasi pimpinan dengan staf secara baik agar tercipta suasana yg baik untuk mmbangun lapas

Persoalan pemberantasan peredaran narkoba di lapas dan rutan Saya mengingatkan tidak ada toleransi untuk pegawai yg terlibat. Kita harus melakukan razia rutin, lebih ketat terhadap pintu masuk Hidupkan prinsip diri, "sebelum membersihkan lapas,bersihkan diri sendiri" Sinergitas antar aparat penegak hukum Agar pimpinan terus menjalin sinergi dengan forkopimda. Namun tidak hanya kalapas namun pejabat dan seluruh pegawai melakukan sinergi dengan forkopimda. Ditutup dengan kepala bagian umum memberikan penguatan tentang pola karir. Hadiyanto menjelaskan agar pegawai di lapas waykanan harus menggali skill atau kemampuan dirisendiri. Jangan takut untuk mengikuti segala diklat yang ada di kementerian. Lanjutkan pendidikan dan lakukan penyesuaian ijazah. Bekerja dengan integritas dan loyalitas terhadap lapas dan pimpinan.

Harapannya dengan diberikannya penguatan oleh kakanwil menambah motivasi dalam bekerja untuk pegawai lapas Way Kanan. •





# KAKANWIL TINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS PERTAMA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KALIANDA



*Kakanwil Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi di Lapas Kalianda didampingi oleh Kalapas Kalianda*

Bertempat di Aula Lapas Kalianda, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo tinjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis pertama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda pada Kamis (04/02/2021). Dalam kunjungannya Kakanwil diterima langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda, Tetra Destorie beserta jajaran.

Kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis pertama ini adalah hasil Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan Puskesmas Kalianda. Adapun penerima vaksinasi ini adalah seluruh petugas Lapas termasuk Kalapas. Dengan adanya vaksinasi Covid-19 diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19. "Dengan adanya



*Kakanwil Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi di Lapas Kalianda didampingi oleh Kalapas Kalianda*

vaksinasi, semoga kami bisa melindungi para Warga Binaan di Lapas Kalianda dari Covid 19 dan semoga kita semua terbebas dari Pandemi Covid 19, amin," ujar Tetra. Vaksinasi Covid 19 di Lapas Kelas IIA Kalianda merupakan kegiatan vaksinasi pertama di antara

Unit Pelaksana Teknis di Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. Harapannya vaksinasi ini dalam pelaksanaannya, bisa menjadi contoh bagi UPT lain di Provinsi Lampung. •



# KEPALA BPKP PERWAKILAN LAMPUNG BERIKAN PENGUATAN SPIP DAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN ANGGARAN 2021 DI JAJARAN KANTOR WILAYAH



*Peserta Penguatan SPIP dan Manajemen Risiko dari Seluruh Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Lampung*

**K**amis (04/03/2021) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Manajemen Risiko (MR) Tahun Anggaran 2021. Bertempat di Aula Kantor Wilayah, turut mengundang 2 (dua) orang narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dan 1 (satu) orang narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, turut hadir pula Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara dan pejabat administrator Kanwil Lampung serta 52 orang peserta dari Satuan Kerja jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo

yang memberikan apresiasi kepada BPKP yang terus mendukung kemajuan SPIP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Lampung. Danan menjelaskan bahwa adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) merupakan salah satu sistem agar Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diharapkan penguatan integritas yang dibangun dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pelaksanaan system pengawasan dan pengendalian instansi pemerintah.

Dilanjutkan dengan pe-  
materi pertama dari BPKP,  
Kepala Perwakilan BPKP  
Lampung, Sumitro,  
S.E., Ak., MM.,  
CA., CFA.,  
Q I A

menjelaskan tentang prestasi dan masalah yang

masih terjadi di jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia. Untuk itu BPKP melakukan 4 fokus pengawasan yaitu pengawasan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan asset negara/asset daerah, serta peningkatan tata Kelola pemerintahan. Sumitro juga menjelaskan SPIP di Kemenkumham Republik Indonesia sedang menuju level 4, untuk itu diharapkan kita semua dapat memberikan dorongan agar bisa terwujud dengan meningkatkan kinerja, transparansi, dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selanjutnya pembeda-  
ri kedua







*Kepala BPKP, Sumitro Memberikan Materi tentang prestasi dan masalah yang masih terjadi di jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia*



*Koordinator Pengawas BPKP, Suharyanto menjelaskan tentang manajemen risiko*



*Pemberian Plakat dari Kakanwil kepada Kepala BPKP dan Tim sebagai Narasumber dalam Penguatan SPIP dan MR*

dari BPKP, Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat,

Suharyanto, Ak, C.A. yang menjelaskan tentang manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk menentukan batasan atau parameter internal dan eksternal yang akan dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan risiko, menentukan lingkup kerja, dan kriteria risiko untuk proses-proses selanjutnya. Suharyanto juga meminta untuk dapat menganalisa dan evaluasi risiko, dimana Analisa risiko berupaya untuk memahami sifat-sifat risiko dan kemudian menentukan peringkat risiko serta hasil dari analisis risiko bisa menjadi bahan masukan dalam tahapan evaluasi dan penentuan penanganan risiko yang diperlukan.

Acara berlanjut dengan Pemateri Ketiga dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Auditor Madya, Tatie Raini memberikan penguatan dan persiapan peningkatan maturitas SPIP level 4 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tatie menjelaskan 4 strategi peningkatan maturitas SPIP, dengan membangun SPIP, mengukur maturitas SPIP, penguatan efektifitas SPIP, serta mengembangkan SPIP tematik. Tantangan bagi Kementerian Hukum dan HAM terkait capaian maturitas SPIP diharapkan bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP dan peningkatan kuantitas maturitas SPIP.

Di akhir acara diadakan sesi tanya jawab, dan para peserta antusias dengan mengajukan pertanyaan terkait SPIP dan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. •



## KAKANWIL TINJAU LANGSUNG LAPAS GUNUNG SUGIH DAN LPKA BANDAR LAMPUNG



*Kakanwil beserta Tim Lakukan Pemantauan Langsung Area Lapas Kelas IIB Gunung Sugih*

Senin (08/03/2021) Mengawali minggu kedua bulan maret, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo didampingi Kepala Bagian Umum, Hadiyanto melakukan Kunjungan Kerja Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.



*Kakanwil Meninjau Hasil Sablon Pakaian dari Karya Warga Binaan Pemasyarakatan*

Danan mengawali kegiatan kunjungan ke Lapas Kelas IIB Gunung Sugih yang disambut secara langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Denial Arif. Kedatangan kakanwil dalam rangka pemantauan langsung area Lapas Kelas IIB Gunung Sugih dan juga kegiatan kerja serta keterampilan yang sedang dilaksanakan disana. Danan juga meninjau hasil-hasil dari karya Warga Binaan Pemasyarakatan, dari jahe merah yang dijadikan minuman, sablon pakaian, pembuatan makanan (camilan) berbahan tomat, dan juga pe-

latihan memasak. Hal ini diapresiasi oleh Danan dan juga diharapkan bisa terus berlanjut serta pengetahuan maupun keterampilan bisa ditularkan ke Warga Binaan lainnya. Kunjungan selanjutnya yang bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Kepala LPKA, Sambiyo menyambut kedatangan Kepala Kantor Wilayah Lampung didampingi para pejabat structural disana. Kunjungan

ke LPKA ini meninjau langsung hasil perubahan wisma hunian, yang nantinya akan dialihfungsikan menjadi tempat Warga Binaan yang telah memasuki usia lanjut (lansia). Di akhir kunjungan Danan terus memotivasi dan memberikan dukungan, agar terus bersemangat dan terus berinovasi untuk LPKA, demi kemajuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. •





# KAKANWIL KUMHAM LAMPUNG BUKA PROGRAM REHABILITASI NARKOTIKA DAN PELATIHAN KEMANDIRIAN BAGI WBP LPP KELAS IIA BANDAR LAMPUNG



*Kakanwil Berfoto dengan WBP Peserta Program Rehabilitasi dan Pelatihan Kemandirian*

Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandar Lampung, Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo buka Program Rehabilitasi Narkotika dan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Selasa (09/03/2021). Tak sendiri, Kakanwil juga didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Farid Junaedi, Kepala LPP Kelas IIA Bandar Lampung Putranti Rahayu, Kepala Rutan Kelas I Bandar Lampung Sulardi, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Kunrat Asmiri, perwakilan BNNP Lampung, perwakilan Panti Rehabilitasi Sosial Wisma Ataraxis serta Narasumber dari Fakultas Pertanian Unila, .

Kegiatan diawali dengan Laporan oleh Kepala LPP Kelas IIA Bandar Lampung, Putranti Rahayu. Rahayu menyampaikan jika tujuan dari adanya kegiatan ini adalah memberikan pelatihan keterampilan, mendorong kelangsungan dan kemajuan industri dalam Lapas, serta dalam rangka pengurangan kebutuhan zat narkotika dan meningkatkan kualitas hidup WBP.

Kegiatan Pelatihan Kemandirian ini bekerjasama dengan Universitas Lampung untuk Pelatihan Budidaya Tanaman Hias dan Sayuran. Pelatihan budidaya perikanan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Adapun untuk program rehabilitasi sosial, LPP Kelas IIA

Bandar Lampung bekerjasama dengan Panti Rehabilitasi Sosial Wisma Ataraxis. Kegiatan pelatihan tersebut akan dilaksanakan selama 18 hari kerja, sedangkan untuk rehabilitasi berlangsung selama 180 hari kerja.

Dilanjutkan dengan arahan Kakanwil, Danan Purnomo. Dalam arahannya Danan menyampaikan agar WBP memanfaatkan kesempatan ini sebagai sarana melatih kemandirian. "Saya harapkan ini dimanfaatkan betul oleh WBP apa yang diajarkan narasumber dan jangan segan-segan untuk bertanya," ujarnya. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya membuka secara resmi Program Rehabilitasi Narkotika dan Pe-





latihan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung” pungkaskan Danan.

Usai membuka kegiatan, Danan juga meresmikan Green House el'Pualam di LPP Bandar Lampung. Green house tersebut berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman hias serta sayuran bagi WBP. Harapannya budidaya tanaman hias dan sayuran ini mampu menjadi icon bagi LPP Kelas IIA Bandar Lampung serta mampu menjadi daya tarik masyarakat sehingga mau membeli tanaman hias yang dikelola dari dalam Lapas untuk kebutuhan rumahan maupun perkantoran. Sedangkan untuk pemasarannya akan dibantu oleh seluruh pegawai LPP secara online maupun melalui media sosial. •



*Kakanwil Resmikan Green House el'Pualam LPP Bandar Lampung*



*Kakanwil Tinjau Green House el'Pualam yang Berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman hias serta sayuran bagi WBP*





## BERI PENGUATAN DI RUTAN MENGGALA, KAKANWIL BERPESAN NIATKAN MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS UNTUK MEMBERI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT



*Kakanwil Beri Arahan Kepada Seluruh Pegawai Rutan Menggala*

Pada Rabu (10/03/21), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purmono; bersama Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; dan Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara; mengunjungi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Menggala dalam rangka memberikan penguatan terkait tugas dan fungsi pegawai pemasyarakatan sekaligus penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021. Kunjungan Danan dan tim diterima langsung oleh Kepala Rutan Menggala, Gowim beserta jajarannya.

Sebelum memberikan penguatan, Kepala Kantor Wilayah menyempatkan diri untuk meninjau langsung keadaan Rutan baik sarana/prasarana satuan kerja maupun sumber-

daya manusia. Dalam memberikan penguatan yang diikuti oleh para pegawai Rutan Menggala, Danan menyampaikan bahwa setelah mendeklarasikan Janji Kinerja dan berkomitmen bersama hingga mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, berdasarkan butir Janji Kinerja yang telah dideklarasikan, satuan kerja harus mampu menaati target kinerja yang telah ditetapkan secara tepat waktu.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah menyoroti perihal pencegahan peredaran narkoba di lapas dan rutan, Danan menyimpulkan bahwa kunci dari deteksi dini terhadap peredaran narkoba berawal dari kepedulian dan komunikasi seluruh komponen satuan kerja.

“Kunci dari deteksi dini terhadap pencegahan peredaran narkoba adalah kepedulian seluruh komponen satuan kerja bukan hanya pimpinan saja. Kemudian komunikasi harus dijaga antara pimpinan dan staf, staf juga harus memahami tugas dan kewajibannya.” Ujar Danan.

Menurut Danan, masuknya handphone menjadi masalah utama yang memicu beredarnya narkoba, dan hal ini disebabkan oleh ketidakcermatan dan ketidaktelitian pegawai. Danan juga menegaskan konsekuensi bagi pegawai yang terlibat narkoba, bahwa Kemenkumham tidak memberikan toleransi.

“Ancamannya PDTH. Pemberhentian dengan tidak hormat.” Tegasnya.



Terkait tugas dan fungsi pemasyarakatan, Danan menyampaikan agar para pegawai harus mampu menjaga citra satuan kerjanya, menjaganya dari beragam hal yang dapat memperburuk nama baik satuan kerja.

“Mesti berbangga menjadi penjaga tahanan, menjadi pegawai Kemenkumham. Jaga citra satuan kerja, karena satuan kerja Saudara merupakan rumah kedua.”

Mengenai pembangunan zona integritas, Danan memberi arahan agar satuan kerja tetap menjaga semangat dalam membangun zona integritas dan melakukan evaluasi terkait apa-apa yang menjadi penyebab kegagalan pembangunan zona integritas. “Cari betul apa yang menyebabkan gagalnya pembangunan zona integritas di satuan kerja.” Danan mengarahkan.

Danan juga berpesan agar satuan kerja membangun zona integritas secara wajar sesuai dengan kemampuan satuan kerja yang dimiliki, dengan niat untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.



*Kakanwil didampingi Kabag Umum, Kabag Program & Humas serta Kauran Menggala meninjau langsung keadaan Rutan baik sarana/prasarana satuan kerja maupun sumber daya manusia.*

“Bangun zona integritas dengan kemampuan yang ada, dan jangan mengada-ngada sehingga menimbulkan pertanyaan dari tim penilai yang berpotensi menggagalkan pe-

nilaian. Jadi lakukan pembangunan zona integritas dengan niat memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat.” Pesan Danan. •





# KETUA KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG GANDENG TIM PENYULUH HUKUM ADAKAN SOSIALISASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020



*Kakanwil didampingi Kabag Umum dan Kabag Program & Humas serta Karutan Menggala meninjau langsung keadaan Rutan baik sarana/prasarana satuan kerja maupun sumber daya manusia.*

Ketua komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal, S.H. menggandeng Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung mengadakan Sosialisasi Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19 di Kampung Negeri Bumi Putra Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan pada Sabtu (13/03/2021).

Acara dibuka oleh Yozi Rizal dan dilanjutkan dengan pemberian materi tentang Perda Prov. Lampung oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung

yang disampaikan oleh Melda Sulastriyawati dan Robi Awaludin. Materi selanjutnya tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu disampaikan oleh Yetno dan Indrawati Imron.

Pada materi pertama tentang Perda nomor 3 tahun 2020 ini jelas diatur sanksi pelanggaran terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan penanganan covid 19. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan akan Covid-19.

Sedangkan tujuan peraturan ini diantaranya adalah untuk melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan ke daruratan kesehatan masyarakat; mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat, serta memberikan kepastian hukum pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah.

Hal tersebut merupakan kewajiban bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat





*Tim Penyuluh Hukum Berikan Penyuluhan Perda Provinsi Lampung No.3 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 19*



*Peserta Penyuluhan dari Kampung Negeri Bumi Putra Mendengarkan Materi Penyuluhan*



*Materi tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu disampaikan oleh Tim Penyuluh Hukum, Yetno*

kat. Saat ini pemerintah sedang melakukan program pemberian vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, untuk itu kita semua wajib mendukung terlaksananya program tersebut guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ditegaskan pula terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas serta terdapat sanksi bagi setiap orang, penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggarnya.

Sanksi pelanggaran berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum, denda administratif, serta daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan ini Tim Penyuluh Hukum juga menyampaikan informasi terkait Bantuan Hukum untuk orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum, dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terverifikasi dan terakreditasi sebagai pemberi bantuan hukum di Provinsi Lampung yang saat ini berjumlah 17 OBH. Jenis Bantuan hukum yang diberikan yaitu Litigasi dan Non Litigasi baik Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Syarat memperoleh bantuan hukum diantaranya melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKM) serta dokumen lain yang diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. •





# KANWIL LAMPUNG FASILITASI NASKAH AKADEMIK DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT



Senin (15/03/21), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan bersama dengan Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia Oktaviani Pakpahan; Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, Masriakromi dan Staff Perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung hadir dalam kegiatan fasilitasi Naskah Akademik dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat yang diadakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, kedatangan rombongan diterima oleh bapak Adi Utama selaku asisten 1 bidang Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat beserta jajarannya. Untuk efektifitas jalan-

nya kegiatan, maka dibentuk dua tim. Masing-masing tim akan melanjutkan pembahasan mengenai kegiatan fasilitasi Naskah Akademik dan Kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat.

Tim Naskah Akademik dipimpin oleh Nur Ichwan yang sekaligus sebagai ketua tim penyusunan Naskah Akademik di dampingi oleh Rugun Pakpahan sebagai tim fasilitasi Naskah Akademik. Koordinasi terkait fasilitasi yang akan diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga disampaikan dalam kesempatan ini. Fasilitasi tersebut guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah serta meminimalisir disharmonisasi rancangan peraturan daerah baik dengan pera-

turan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan.

Sementara itu, Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat dipimpin oleh Sarjak selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Pembahasan dilakukan terkait Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Lampung Barat tentang penerapan standar pelayanan minimal dan pembentukan forum penguangan resiko bencana alam. Para staff perancang juga turut menyampaikan tanggapannya baik dalam hal-hal teknis maupun substansi demi perbaikan Raperbup. Tanggapan tersebut disambut baik oleh bagian hukum Pemda Lampung Barat. •



## KANWIL LAMPUNG IKUTI FGD, MENKUMHAM HIMBAU PERAN SERTA KANWIL UNTUK MEMAJUKAN BISNIS DAN HAM



*Bertempat di Aula, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti FGD implementasi bisnis dan HAM serta pengenalan PRISMA*

**D**irektorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Ditjen HAM) bekerja sama dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) Indonesia mengadakan Focused Group Discussion (FGD) online dalam rangka implementasi bisnis dan HAM serta pengenalan PRISMA yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia kepada Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia. Selasa (16/03/2021)

Di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo Bersama dengan Kepala Divisi Masyarakat, Farid Junaedi beserta Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, para JFU

dan JFT mengikuti kegiatan FGD tersebut.

Diawali dengan sambutan dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi dan dilanjutkan oleh Almut Besold selaku Kepala Kantor Perwakilan FNF di Indonesia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly membuka secara langsung kegiatan FGD. Dalam sambutannya Yasonna menyampaikan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM memiliki peranan penting dalam mendorong prinsip-prinsip bisnis dan HAM, bagi perusahaan-perusahaan yang berbasis di daerah. Salah satunya dengan meng-

ikuti kegiatan FGD tersebut. Diakhir sambutan Yasonna menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada FNF yang telah mendukung dan berkomitmen membantu pemerintah dalam memajukan Bisnis dan HAM di Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait peranan Kantor Wilayah dalam mendukung implementasi bisnis dan HAM oleh Mualimin Abdi. Mualimin mengharapkan agar Kantor Wilayah bisa mensosialisasikan dan memberikan pelatihan bisnis dan HAM untuk meningkatkan pemahaman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha, serta mensosialisasikan Aplikasi PRISMA dan turut membentuk Forum Ko-







*Sambutan Menteri Hukum dan HAM. Yasonna H. Laoly*



*Kakanwil Mengikuti Jalannya FGD Secara Virtual*

an HAM serta mampu mengidentifikasi dan menilai potensial dari aktivitasnya atau relasi bisnisnya. Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dari Para peserta FGD dari Kantor Wilayah seluruh Indonesia. •

ordinasi dengan melibatkan Pemda dan Pelaku Usaha agar dapat mendorong penyusunan regulasi daerah yang menerapkan norma dan nilai Bisnis dan HAM.

Selanjutnya Direktur Kerja Sama HAM Ditjen HAM, Hagerati selaku narasumber dalam FGD ini juga menjelaskan tanggung jawab negara di Bidang HAM dalam Bisnis. Hagerati menjelaskan bahwa secara khusus, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi implementasi HAM dalam konteks bisnis melalui pembuatan kebijakan dan peraturan,

pemberian panduan bagi pelaku usaha, pemenuhan koherensi aturan hukum, serta melakukan pengawasan dan pemeliharaan sinergi dengan pelaku usaha maupun Lembaga.

Narasumber terakhir yaitu Patricia Rinwigati menjelaskan hal-hal terkait penilaian resiko Bisnis dan HAM. Patricia menilai agar semua bisa terwujud negara harus berperan aktif untuk merumuskan ekspektasi dengan jelas bagaimana perusahaan dapat menghormati HAM dan juga Pelaku Usaha harus menghindari pelanggaran-





## KANWIL LAMPUNG GELAR RAPAT KOORDINASI TIMPORA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

**B**ertempat di Hotel Golden Tulip Ruang Edelweiss. Kamis (18/03/2021) Kegiatan Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Tema "Sinergitas Antar Instansi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk Meningkatkan Perekonomian Nasional" digelar. Hadir membuka Kegiatan Rakor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo, Kepala Divisi Keimigrasian, Hasanudin, Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi didampingi para pejabat Administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Lampung.

Rapat Koordinasi ini beranggotakan dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Lampung, UPT Imigrasi jajar-an Kantor Wilayah Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam Lampung, Badan Intelijen Negara Daerah Lampung, Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung, Kementerian Agama Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi

Lampung, Dinas Tenaga-kerja Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Pasintel Pangkalan Angkatan Laut Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Lampung, dan Basandi Intel Pangkalan Angkatan Udara Lampung.

Diawali dengan Laporan Ketua Panitia yang dalam hal

ini disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi, dan Sarana Keimigrasian, Raden Ayu Fatimah memberikan laporan sekaligus maksud dan tujuan terkait dengan Rapat Koordinasi TIMPORA tingkat provinsi, yang dalam hal ini demi meningkatkan sinergitas serta peran Lembaga dari instansi terkait dalam melakukan pengawasan orang asing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta dapat aktif meningkatkan intensitas konsentrasi dan kolaborasi kegiatan di lapangan.

Selanjutnya, Sambutan dari Kepala Kantor Wilayah sekaligus membuka jalannya Rapat Koordinasi TIMPORA ini. Danan menyampaikan Peran TIMPORA Gabungan merupakan wadah pertukaran informasi antar anggota yang perlu dioptimalkan se-







Laporan Ketua Panitia oleh  
Raden Ayu Fatimah



Sambutan dari Kepala Kantor Wilayah sekaligus membuka jalannya  
Rapat Koordinasi TIMPORA

hingga keberadaan TIMPORA diharapkan dapat membangun kesadaran Masyarakat akan pentingnya mengawasi Keberadaan dan Kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di wilayahnya serta tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan hukum WNA terhadap peraturan perundang-undang Republik Indonesia.

Acara Dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian, Ma'mun yang menerangkan tentang selective policy dimana hal ini diberikan kepada orang asing yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan orang asing serta mempertimbangkan kepentingan keamanan dan ketertiban umum yang dilakukan orang asing.

Ma'mun juga menjelaskan bahwa solusi dari permasalahan dapat diselesaikan dengan peningkatan koordinasi antar instansi yang dalam hal ini diwadahi dengan dibentuknya TIMPORA Provinsi Lampung. Terkait dengan pelaporan orang asing, ma'mun menjelaskan perlu diberikan



Jalannya Kegiatan Rapat Koordinasi TIMPORA



" Saya yakin dan percaya bahwa semangat kolaborasi dan sinergitas seluruh anggota TIMPORA Provinsi Lampung akan tetap berkobar guna mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum di Bidang Keimigrasian di Seluruh Wilayah Lampung menjadi Lebih baik lagi," tegas Danan.

sosialisasi dan peran aktif dari penyedia jasa perhotelan untuk melaporakn orang asing yang menginap di tempat usahanya.

Di akhir acara Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Provinsi Lampung ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana perwakilan Badan Inte-

lijen Negara Daerah Lampung dan Pasintel Pangkalan Angkatan Laut Lampung yang menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan serta penindakan terhadap orang asing. •





## KANWIL LAMPUNG ADAKAN PROMOSI DAN DISEMINASI PATEN SEKALIGUS PENANDATANGANAN MOU

**K**antor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Paten sekaligus Penandatanganan MoU antara Kantor Wilayah Lampung dengan Perguruan Tinggi Tahun 2021, Kamis (18/03). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Novotel Bandar Lampung ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo; didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kepala Divisi Pemasarakan, Farid Junaedi; Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, Ignatius Mangantar Tua S; Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara serta para panitia penyelenggara.

Hadir dalam Kegiatan ini Bupati Tanggamus, Dewi Handajani; Plh.Bupati Pesisir Barat, N Lingga Kusuma; serta Para Peserta Kegiatan Promosi dan Diseminasi Paten, baik dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung, Dosen/ Mahasiswa Universitas yang mewakili, Sentra Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas, dan para pelaku usaha/ UMKM.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, Nur Ichwan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dilanjutkan Sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Danan Purnomo sekaligus membuka kegiatan tersebut dengan ditandai pemukulan Gong. Dalam sam-

butannya, Danan Purnomo menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan Promosi dan Diseminasi Paten Tahun 2021 ini adalah sebagai sarana diskusi dan promosi mengenai Layanan Kekayaan Intelektual yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung khususnya Paten serta untuk memahami pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di wilayah Provinsi Lampung yang mengangkat tema "Dengan Pendaftaran Paten Menjamin Pertumbuhan dan Perlindungan Terhadap Inovasi".

Danan menjelaskan untuk mendorong peningkatan paten di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki empat (4) kebijakan untuk meningkatkan aplikasi Kekayaan Intelektual ditengah masyarakat dan mendukung bisnis, serta menarik investasi ke Indonesia, yaitu: Layanan publik







penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kepala Kantor Wilayah



Penyerahan Sertifikat Merek oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada perwakilan penerima merek



Penandatanganan Mou antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Perguruan Tinggi di Lampung



"Salah satu manfaat pendaftaran paten adalah pendaftar dapat menikmati royalti dari hasil lisensi Paten yang dimilikinya. Pendaftar tersebut juga dapat membangun industri yang memproduksi produk yang telah dilindungi Paten. Disamping bernilai ekonomis, inovasi yang dimiliki mendapat perlindungan dan produk tersebut tidak dapat ditiru secara bebas karena telah dilindungi oleh Paten. Paten dapat digunakan untuk mencegah pesaing/kompetitor untuk membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk menjual atau mengimpor produk yang tercakup dalam klaim Paten", ucap Danan.

yang kualitasnya terus ditingkatkan yaitu melalui pendaftaran online yang didukung oleh dasar hukum dan regulasi, percepatan pendaftaran merek serta paten sederhana yang tertuang di UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, melakukan berbagai kerja sama dengan pemangku kepentingan seperti industri dan universitas, serta meningkatkan sosialisasi dan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual melalui berbagai channel seperti diskusi hingga sosial media.

Selanjutnya penandatanganan Mou antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dengan Perguruan Tinggi di Lampung antara lain dengan Universitas Malahayati, Institut Teknologi Sumatera, Universitas

Muhammadiyah Metro, Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Universitas Muhammadiyah Lampung, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Lampung. Mou ini berkaitan tentang sinergitas bersama memajukan Provinsi Lampung melalui pengembangan SDM dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual secara komprehensif.

Acara berlanjut dengan penyerahan Surat Pencatatan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Bupati Tanggamus, Dewi Handajani dan Plh.Bupati Pesisir Barat, N Lingga Kusuma serta Penyerahan Sertifikat Merek oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kepada perwakilan penerima merek.





Masuk ke acara utama, Kegiatan Promosi dan Diseminasi Paten mengundang para narasumber untuk memberikan materi maupun penjelasan mengenai Paten, yaitu : Dwi Waskita Trisna Utama selaku Pemeriksa Paten Madya pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM; Syahrone selaku Kepala Seksi Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM; dan Meizano Ardhi Muhammad selaku Ketua Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab oleh para peserta yang hadir.

Perlu diketahui, kegiatan Promosi dan Diseminasi Paten yang berjalan ini tetap mematuhi protokol kesehatan. Dimana para peserta dan narasumber melakukan beberapa langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memakai masker, penggunaan handsanitizer, pengecekan suhu tubuh dan juga menjaga jarak.



*Pemberian materi tentang paten dari para narasumber yang dimoderatori Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM*



*Sesi tanya jawab oleh para peserta yang hadir*



*Foto bersama antara Kakanwil dengan para narasumber dan peserta kegiatan*





## KANWIL LAMPUNG LAKUKAN UPAYA PENINGKATAN ASISTENSI PENGGUNAAN LAYANAN INFORMASI JDIH



**K**amis (18/03/21), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menyelenggarakan kegiatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertempat di AULA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan JDIH.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bapak Nur Ichwan. Turut hadir dalam kegiatan Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia OP; Kepala Sub Bagian Penyuluh Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH, Doni Arianto Raharjo; dan jajarannya. Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Lampung, Perpustakaan Arsip dan Dokumtasi Daerah Provinsi Lampung. Hadir sebagai narasumber Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, Kepala

Sub Bidang Penerbitan dan Publikasi Hukum BPHN, dan Dinas Kominfo. Dalam kegiatan ini juga diberikan piagam penghargaan kepada anggota JDIH terbaik oleh Kanwil Lampung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah, dan cepat sebagai tujuan terlaksananya Integrasi Informasi Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum (JDIH) dengan seluruh Anggota JDIH baik





Institusi, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, PTN/PTS di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peta Anggota yang disampaikan oleh Kepala Sub Bidang Penerbitan dan Publikasi Hukum BPHN, Claudia V.G pengelolaan JDIH Provinsi Lampung dengan jumlah anggota 32, sebanyak 23 anggota sudah memiliki website JDIH, dan sebanyak 21 sudah terintegrasi dengan Portal JDIHN.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pendampingan terhadap Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum yang merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen hukum sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 yaitu Indonesian Legal Documentation System (ILDIS). Terdapat 4 tipe pengolahan dokumen hukum dalam ILDIS yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Monografi Hukum, Artikel/Majalah Hukum, dan Putusan/Yurisprudensi. Aplikasi ILDIS bersifat bebas pakai artinya boleh digunakan boleh juga untuk menggunakan Aplikasi sendiri, Aplikasi ILDIS ini bersifat memudahkan untuk mengintegrasikan dengan pusat karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan JDIH, karena pada dasarnya setiap Instansi dan DPRD mempunyai produk Hukum yang berbeda.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan,



*Pemberian penghargaan kepada anggota JDIH terbaik oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM*

efektif, efisien, dan bertanggung jawab akan meningkat. Serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah dalam sebuah Basis Data Nasional Dokumen Hukum Nasional lebih terjamin. •





## KAKANWIL LAKSANAKAN VAKSINASI COVID-19 TAHAP 2 DI LAPAS KALIANDA



Bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda dalam rangka menyukseskan Program Vaksinasi Covid-19, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo didampingi Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda, Tetra Destorie mengikuti Vaksinasi Covid-19 Tahap 2. Kamis (18/03/2021)

Kegiatan Vaksinasi Covid-19 dosis Kedua ini dilaksanakan untuk seluruh pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dan Puskesmas Kalianda. Danan berharap Kegiatan serupa dapat juga dilaksanakan di seluruh Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan Vaksinasi Covid-19 untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya ungkap Danan disela-sela kegiatan Vaksinasi. •



## GELAR PEMBINAAN SATGAS KAMTIB UPT PEMASYARAKATAN, KANWIL LAMPUNG HADIRKAN NARASUMBER HIMPSI DAN POLTEKKES



*Kakanwil dan PIMTI foto bersama dengan peserta Pembinaan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Lampung*

**D**i Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Rabu (24/03/2021) Kegiatan Pembinaan Satuan Tugas (Satgas) Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Lampung Tahun 2021 digelar.

Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan beserta Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas turut hadir dalam kegiatan. Para peserta dari UPT Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebanyak 100 orang mengikuti jalannya kegiatan pembinaan. Dihadirkan pula Narasumber psikologi

yaitu Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Lampung, Shinta Mayasari, M.Psi. dan juga Narasumber dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang (Poltekkes) yai-

tu Dosen Fungsional, Idawati Manurung, S.Kp., M.Kes.

Diawali dengan sambutan Ketua Panitia dalam hal ini Kepala Bidang Pelayanan Tahanan,





Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, & Keamanan, Yuniarto melaporkan hal terkait alasan terbentuknya Kegiatan Pembinaan Satgas Kamtib di Jajaran UPT Pemasarakatan Lampung Tahun 2021.

Selanjutnya, memberikan sambutan sekaligus membuka jalannya acara Pembinaan Kepada Satgas Kamtib, Danan berpesan kepada seluruh jajaran Kamtib di UPT Pemasarakatan untuk saling meningkatkan sinergitas dan kedisiplinan, "Setelah tercipta sinergitas dan disiplin, maka akan terjalin komunikasi yang baik pula" Ujar Danan. "Hal ini dapat berguna untuk pencegahan atau deteksi dini dalam gangguan Kamtib yang bisa saja terjadi di dalam Lapas maupun Rutan" Ucap Danan.

Tidak lupa Danan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta kegiatan ini dan juga kepada narasumber yang dihadirkan dari Himpsi Wilayah Lampung dan Poltekkes Tanjung Karang. Semoga dengan diadakan kegiatan pembinaan ini, menjadikan Insan Pemasarakatan khususnya Satgas Kamtib UPT Pemasarakatan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan kompeten sehingga UPT Pemasarakatan menjadi selalu tertib, aman dan kondusif.

Berlanjut dengan Arahan dari Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid mengarahkan Kepada seluruh Jajaran Kamtib di Lapas maupun Rutan harus sering berkomunikasi guna untuk deteksi dini dalam gangguan Kamtib. Farid juga meminta untuk seluruh Satgas Kamtib di Lapas dan Rutan untuk melakukan Admisi Orientasi guna untuk Pengenalan Lingkungan kepada Tahanan baru, Melaksanakan kegiatan Salam Pemasarakatan untuk lebih memahami kondisi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Dan terakhir Farid meminta untuk selalu berperan aktif dengan Tim Psikologi dan Tim Poltekkes yang telah bekerja sama dengan Divisi Pemasarakatan demi terjalin nya situasi yang kondusif di dalam Lapas dan Rutan.

Aktif bersama peserta dengan menjalankan komunikasi 2 (dua) arah, Narasumber dari Himpsi, Shinta mengambil Tema Pelatihan Keterampilan Dasar Konseling Dasar dengan memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dari pengawali konseling yaitu dengan menimbulkan trust atau kepercayaan kepada client yang dalam hal ini WBP. Shinta juga menjelaskan Asumsi Dasar



*Narasumber dari HIMPSI dan Poltekkes berikan materi kepada peserta*

dalam kegiatan konseling, bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki hal buruk dan hal baik, maka dari itu kegiatan konseling berguna untuk membangkitkan hal baik atau potensi diri yang baik pada diri manusia.

Narasumber yang terakhir dari Poltekkes Tanjung Karang, Idawati membahas tentang Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, dimana komunikasi harus berjalan 2 (dua) arah atau timbal balik, agar komunikasi bisa saling dimengerti satu sama lain. "Lakukan komunikasi verbal yang efektif dengan penyampaian yang tulus, karena apabila komunikasi tidak berfungsi dengan baik maka akan terbentuk perbedaan pemikiran" ucap Ida. Ida juga menjelaskan beberapa hal yang membuat komunikasi tidak berfungsi dengan baik yaitu informasi yang disampaikan tidak beraturan, adanya hirarki kekuasaan dan kewenangan, perbedaan gender dan budaya, hubungan tim kerja yang tidak harmonis, serta sudut pandang yang berbeda.

Acara di akhiri dengan sharing antara narasumber dan peserta, yang tampak disambut antusias dengan adanya pertanyaan dan keluhan yang dihadapi oleh Satgas Kamtib UPT Pemasarakatan Lampung. •





## KAKANWIL LANTIK PAW ANGGOTA MPDN DAN BUKA RAPAT KOORDINASI MPW - MPD NOTARIS SE-PROVINSI LAMPUNG



LAMPUNG\_INFO - Kegiatan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat dan Kegiatan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Se-Provinsi Lampung dengan tema "Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Tahun 2021" digelar di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung. Kamis (25/03/2021)

Diawali dengan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota MPDN, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo melantik dan mengambil Sumpah Jabatan PAW Anggota MPD Notaris Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat dan Pesisir, pelantikan yg dilaksanakan

bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi MPDN dan MPWN se-Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya Danan mengharapkan kepada PAW anggota MPDN yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan segera bersinergi dengan anggota lainnya, dalam menjaga marwah dari MPDN. Apresiasi juga diberikan oleh Danan kepada 3 (tiga) Nara-

sumber yang berkenan hadir baik secara langsung maupun virtual pada Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris di Propinsi Lampung.

"Saya berharap acara rapat koordinasi ini menjadi ajang berbagi ilmu dan informasi antar MPD maupun MPW" ujar Danan yg juga dalam kegiatan ini sebagai Keynote Speech.







*Di Moderator oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso membuka jalannya Rapat Koordinasi*

Di Moderator oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso membuka jalannya Rapat Koordinasi. Diawali dengan Narasumber yang pertama secara virtual dari Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris, Fardian yang mengangkat tentang pengaturan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sesuai dengan undang-undang Jabatan Notaris dan Permenkumham. Fardian juga mengungkapkan dalam bentuk urgensi perubahan tentang tata cara pemeriksaan MPN masih belum mendapatkan keseragaman dalam proses pemeriksaan notaris, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan terhadap notaris belum terakomodir sesuai kebutuhan dan perkembangan hukum.

Narasumber selanjutnya Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Propinsi Lampung, Zul April yang juga selaku Wakil Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Lampung. Dalam penyampaiannya Zul April membahas ter-

kait fungsi dan kode etik notaris yaitu dengan mengontrol perilaku notaris dalam menjalankan profesinya agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan serta menjaga martabat notaris. Zul juga menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan notaris terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur pemerintah, unsur organisasi, serta unsur ahli/akademisi.

Selanjutnya narasumber terakhir, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nunung Sumyati menjelaskan dasar hukum pelaksanaan tugas majelis pengawas notaris. Nunung menerangkan tentang apa saja persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan menjadi Majelis Pengawas Notaris. Terakhir nunung berharap dapat terwujudnya kelembagaan Majelis Pengawas Notaris yang memiliki integritas, kemandirian, kedisiplinan dan kompetensi dibidang pembinaan dan pengawas terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku no-

taris dalam pelaksanaan fungsi pelayanan serta penerapan dan penegakan hukum terhadap jabatan Notaris.

Selanjutnya narasumber terakhir, Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nunung Sumyati menjelaskan dasar hukum pelaksanaan tugas majelis pengawas notaris. Nunung menerangkan tentang apa saja persyaratan untuk dapat diangkat dan diberhentikan menjadi Majelis Pengawas Notaris. Terakhir nunung berharap dapat terwujudnya kelembagaan Majelis Pengawas Notaris yang memiliki integritas, kemandirian, kedisiplinan dan kompetensi dibidang pembinaan dan pengawas terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris dalam pelaksanaan fungsi pelayanan serta penerapan dan penegakan hukum terhadap jabatan Notaris. •



# KADIVMIN BERIKAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI TELADAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



*Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara beri piagam penghargaan kepada Pegawai Teladan periode Januari 2021, Dedy Nasrizal*



*Asep Asikin, Pegawai Teladan periode Februari 2021 terima penghargaan dari Kepala Divisi Administrasi*

Selasa (30/03/2021), Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara selaku Plh. Kepala Kantor Wilayah berikan penghargaan kepada pegawai teladan Kanwil Kemenkumham Lampung. Pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan apel pagi di lapangan upacara Kanwil Kemenkumham Lampung. Pemilihan pegawai te-

ladan untuk periode Januari 2021 jatuh kepada Analis Kepegawaian Muda, Dedy Nasrizal. Sedangkan untuk periode Februari 2021 pegawai teladan terpilih adalah Analis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Mekanisme pemilihan pegawai teladan diawali dengan usulan pegawai dari

masing-masing bidang oleh pejabat struktural. Setelah itu nama-nama pegawai hasil usulan akan dimasukkan dalam nominasi pegawai teladan yang dipilih oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung melalui poling online.

Kadivmin mengapresiasi kinerja dari para pegawai teladan yang terpilih. Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan merupakan salah satu pendukung untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pegawai Teladan ini diharapkan mampu menjadi role model atau contoh dalam melakukan perubahan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung. •





## KANWIL LAMPUNG DAMPINGI KEGIATAN MONEV TIM BIRO HUMAS, HUKUM DAN KERJA SAMA



*Kepala Divisi Pemasaryakatan, Farid Junaedi (tiga dari kiri) dan Kalapas Kelas I Bandar Lampung (tiga dari kanan) saat mendampingi Tim Biro Humas, Hukum dan Kerjasama*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mendampingi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Bandar Lampung. Senin (30/03/2021)

Kegiatan Monev oleh Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah dibuat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Jajaran Kantor Wilayah Lampung dengan stakeholder terkait. Tim dari Biro Humas yang dalam hal ini Lutfi dan Edi didampingi oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali melakukan peninjauan perta-

ma di LPKA Bandar Lampung.

Dalam Kunjungannya ke LPKA, Tim Biro Humas berbin-cang secara langsung bersama Wadah Indonesia Berbagi (WIBER) Lampung yang telah menjalin Perjanjian Kerja Sama. Pendiri dari WIBER Lampung, Gabie menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan di LPKA ini guna untuk membina dan membentuk kemampuan kreatifitas dari Anak Bermasalah Hukum (ABH) yang berada di LPKA. Ketua WIBER Lampung, Stevan dalam hal ini menjelaskan tentang apa saja kegiatan dan kendala yang dihadapi selama ini di LPKA. Dalam Monev yang dilakukan oleh Tim Biro Humas Sekjen menilai bahwa kegiatan ini baik dilakukan untuk perkembangan anak. Hal ini bisa menjadikan pertimbangan agar Perjanjian Kerja Sama dapat dilaksanakan secara global di seluruh LPKA

se-Indonesia. Andhika yang dalam waktu ini mewakili Kepala LPKA berpendapat peran aktif dari kegiatan yang dilaksanakan WIBER Lampung ini berdampak kepada ABH, contohnya menjadi lebih aktif, ceria dan lebih mandiri.

Selanjutnya kegiatan Monev Tim Biro Humas menuju Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Disambut secara langsung oleh Kepala LPP, Putranti Rahayu, Monev yang melihat hasil Perjanjian Kerja Sama, dari Asosiasi Laundry, Tapis Lampung serta Pelatihan Keterampilan Tanaman Hias di lingkungan Lapas. Di sela-sela pembicaraan, Putranti berharap kegiatan keterampilan yang melibatkan dengan stakeholder ini dapat mendapatkan penghasilan yang nantinya dapat menunjang Penerimaan Negara Bukan Pajak





*Foto bersama antara Tim Biro Humas, Hukum dan Kerjasama dengan Tim Wadah Indonesia Berbagi (Wiber) dan Petugas LPKA*

(PNBP) dari Lapas Perempuan dengan menjual hasil dari Keterampilan baik secara langsung maupun online. Tim dari Biro Humas mengapresiasi terobosan yang akan dilaksanakan oleh Lapas Perempuan. Diharapkan kegiatan keterampilan ini bukan hanya mengasah kemampuan namun juga mendapat penghasilan yang nantinya bisa menjadi PNBP yang dihasilkan Lapas Perempuan.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dari Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama ini rencananya akan dilaksanakan selama tanggal 30-31 Maret 2021 dilanjutkan ke Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Balai Masyarakat Kelas II Bandar Lampung

### **Kunjungi Lapas dan Bapas Bandar Lampung**

Hari kedua, Tim Monitoring dan Evaluasi Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Lembaga Masyarakat Kelas I Bandar Lampung dan Balai Pe-

masyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Rabu (31/03/2021)

Didampingi oleh Kepala Divisi Masyarakat, Farid Junaedi dan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali, Tim Monev Biro Humas bergerak menuju Lapas Kelas I Bandar Lampung. Disambut secara langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar mengundang 2 (dua) stakeholder yang telah melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu dari Adian Tapis dan Balai Latihan Kerja terkait sablon.

Farid membuka jalannya acara dengan menjelaskan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kantor Wilayah Lampung merupakan betuk tindak lanjut dari arahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maizar juga berpendapat bahwa kebutuhan Warga Binaan yang ada di Lapas Kelas I Bandar Lampung ini lebih kepada

Spiritual, hal itu dikarenakan Lapas Rajabasa merupakan Lapas dengan Kondisi Maximum Security. Namun kegiatan yang mengasah keterampilan tetap diberlakukan, sehingga Warga Binaan tidak jenuh dalam menjalani masa pidana. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung ke lingkungan Lapas Rajabasa, Lutfi dan Edi selaku Tim Monev Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama menilai kegiatan di Lapas Rajabasa sudah baik dalam pengaplikasian perjanjian kerja samanya, namun demikian diharapkan Kegiatan yang telah dilaksanakan bisa berguna dan berdampak pula kepada pegawai di Lingkungan Lapas Rajabasa.

Monev dilanjutkan ke Bapas Bandar Lampung, Kepala Bapas Bandar Lampung, Rolan menyambut baik kedatangannya. Rolan juga menunjukkan secara fisik Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Bapas Bandar Lampung. Tim Monev mengapresiasi Bapas Bandar Lampung dikarenakan secara fisik Bapas Bandar Lampung sudah mengikuti Tata Naskah Dinas Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri. Tim Monev berharap dengan Perjanjian Kerja Sama yang sudah baik ini dapat terimplementasikan juga dengan kegiatan yang baik serupa. Sebelum meninggalkan Bapas Bandar Lampung, Lutfi dan Edi juga mengontrol area kerja yang dilaksanakan di Bapas Bandar Lampung.



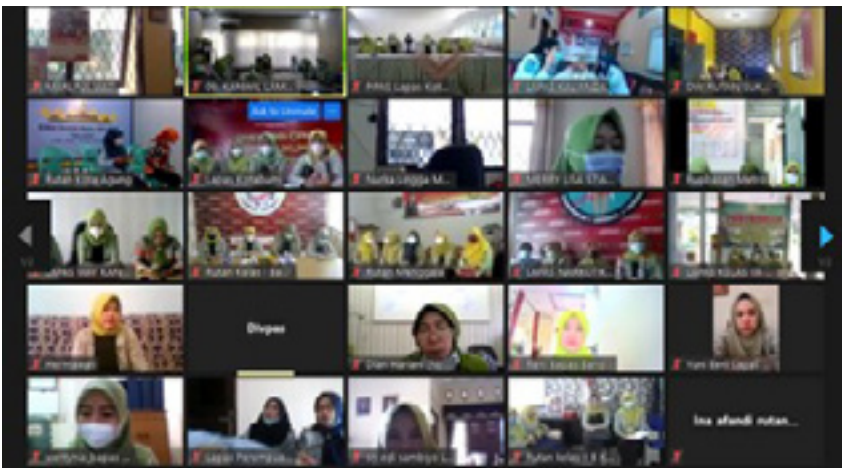


# PAGUYUBAN IBU-IBU PEMASYARAKATAN (PIPAS) LAMPUNG SELENGGARAKAN PERTEMUAN RUTIN SECARA VIRTUAL



Untuk mengenal lebih dekat antar para anggota kegiatan berlanjut dengan perkenalan ibu-ibu dari anggota PIPAS Lampung dari seluruh UPT Pemasarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Lampung. Para pesertapun dengan semangat memperkenalkan diri.

Selanjutnya arahan dari Ketua PIPAS Lampung, Ibu Wiwiek Farid Junaedi. Ibu Wiwiek menyampaikan karena masih dalam masa pandemi Covid-19 pertemuan rutin kali ini diselenggarakan secara virtual. Tak lupa Ibu Wiwiek menyampaikan apresiasi kepada anggota yang telah menyempatkan hadir secara virtual ditengah kesibukan yang lain.



*PIPAS Lampung selenggarakan pertemuan rutin secara virtual melalui Zoom Meeting*

"Pertemuan rutin ini sebagai ajang perkenalan dan silaturahmi agar para anggota dapat mengenal lebih dekat antara satu dengan yang lain," ujar Ibu Wiwiek. "Terimakasih kepada seluruh Kepala UPT Pemasarakatan yang selama ini telah mendukung kegiatan PIPAS," imbuhnya.

Bertempat di Ruang Rapat Divisi Pemasarakatan, Kanwil Kemenkumham Lampung Selenggarakan Silaturahmi Paguyuban Ibu-Ibu Pemasarakatan (PIPAS) Lampung secara virtual pada Kamis (25/03/21). Hadir langsung Ketua PIPAS Lampung, Ibu Wiwiek Farid Junaedi didampingi oleh jajaran pengurus dan anggota PIPAS Lampung diikuti anggota PIPAS dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung yang tergabung secara

virtual melalui Zoom Meeting. Penyampaian laporan kegiatan PIPAS pada periode I oleh Sekretaris, Marlinawati termasuk penggalangan dana bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan serta gempa bumi di Sulawesi Barat dengan dana terkumpul sebesar Rp. 39.500.000.- yang telah disetorkan melalui bendahara PIPAS Pusat. Disampaikan pula laporan keuangan oleh bendahara, meliputi pemasukan dan pengeluaran sebagai bentuk transparansi dari penggunaan dana PIPAS Kanwil Lampung.

Sehubungan dengan mutasi dan promosi di jajaran Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung, kepengurusan PIPAS Lampung juga melakukan penyesuaian sesuai kondisi terkini. Kegiatan ditutup dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PIPAS Lampung masa bakti 2021-2023. Ibu Wiwiek juga memohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota demi kebersamaan dan kemajuan PIPAS Lampung.



## LAYANAN EAZY PASSPORT IMIGRASI SASAR KAMPUS IIB DARMAJAYA LAMPUNG



*Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan "Eazy Passport" yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandar Lampung.*

Selasa (08/03/21), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui Divisi Keimigrasian melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan "Eazy Passport" yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandar Lampung. Kegiatan layanan Eazy Pas-

sport ini merupakan produk inovasi dari Direktorat Jenderal imigrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan passport yang dilakukan tanpa perlu datang ke kantor imigrasi karena petugas Kanim akan mendatangi pemohon di lokasi yang telah ditentukan.

Proses permohonan passport dimulai dari penyerahan dan pemeriksaan berkas persyaratan, wawancara, serta pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari. Passport yang telah selesai prosesnya, bisa diambil oleh perwakilan pemohon atau bisa juga dikirim ke rumah pemohon melalui jasa PT. POS Indonesia.

Program layanan Eazy Passport pada kali ini dilaksanakan di Kampus Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya yang beralamat di Jalan ZA. Pagar Alam No.93, Gedong Meneng, Rajabasa Bandar Lampung, dengan target pemohon passport para mahasiswa/i akademisi serta civitas kampus IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Pelaksanaan Eazy Passport oleh Kanim Bandar Lampung ini merupakan kali kedua di Tahun 2021, dengan antusias





yang sangat luarbiasa. Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pemohon passport yang dilayani oleh Kantor Imigrasi Bandar Lampung pada Kegiatan ini, dimulai dari pukul 09.00 WIB. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Pengembangan Sumber Daya, Muprihan Thaib, S.Sos, M.M. turut menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kantor Imigrasi Bandar Lampung yang telah memberikan pelayanan yang sangat luarbiasa, dan ini menjadi bukti bahwa negara hadir memberikan layanan kepada publik khususnya kepada segenap civitas akademisi serta karyawan IIB Darmajaya Bandar Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Imam Santoso juga menyampaikan terimakasih kepada pihak Kampus IIB Darmajaya yang telah memberikan tempat dan lokasi serta fasilitas bagi Kegiatan layanan Eazy Passport kepada petugas Imigrasi, diharapkan layanan seperti ini bisa berlangsung terus menerus dan menjangkau komunitas lainnya. Diharapkan juga untuk para pemohon yang telah mencoba layanan Eazy Passport ini dapat membagikan pengalaman dan informasi terkait adanya layanan tersebut kepada keluarga, rekan-rekan dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, para petugas dan pemohon juga tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan SOP Pelayanan Paspor di era new normal, yakni melakukan pengecekan suhu, penggunaan masker, social distancing, dan penggunaan hand sanitizer. •



*Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Layanan "Eazy Passport" yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandar Lampung.*





# Strategi Implementasi Kepatuhan Internal

Dalam Rangka Peningkatan Kinerja

oleh Ida Asep Somara



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mencakup kepatuhan internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Kepatuhan Internal berfungsi sebagai penguat pada saat ditemukan kelemahan dalam system pengendalian internal di dalam organisasi. Sehingga dengan penguatan terha-

dap pengawasan internal akan menghasilkan kepatuhan internal yang akan meningkatkan kinerja pegawai.

Dalam implementasi penyelesaian tugas tersebut pada saat ini belum dikelola dengan baik karena masih terpisah-pisah oleh kelompok kerja maupun Tusi yang

melekat pada bagiannya masing-masing. Belum terorganisir secara terintegrasi sehingga menyulitkan dalam pengendalian oleh pimpinan. Sementara, kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan tidak memadai. Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja yang akuntabel perlu didukung dengan





peningkatan kepatuhan internal kepada seluruh jajaran di dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dengan membentuk Klinik Akuntabilitas Kinerja yang berfungsi memantau dan mengedukasi kepada para pemangku kepentingan guna mencegah terjadinya keterlambatan ataupun kesalahan dalam

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pengelola klinik akuntabilitas kinerja adalah kepala divisi administrasi dibantu oleh tim yang merupakan unsur dari semua bidang.

Dengan adanya Klinik Akuntabilitas Kinerja diharapkan tercapainya akuntabilitas dan nilai kinerja yang optimal ser-

ta dilakukannya edukasi dan pendampingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk meminimalisir terjadinya resiko kegagalan, agar terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif. •



### TUJUAN

- Jangka Panjang Tercapainya Peningkatan Kinerja Organisasi
- Jangka Menengah Tercapainya Tingkat Kepatuhan Internal
- Jangka Pendek Tercapainya Internalisasi Kepatuhan Internal



### MANFAAT

- Tercapainya Akuntabilitas Kinerja
- Terpenuhinya Nilai Maturitas
- Terwujudnya Reformasi Birokrasi



### OUTPUT

- Membentuk Klinik Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
- Sosialisasi dan Internalisasi secara terus menerus tentang kepatuhan internal dan akuntabilitas kinerja.



### OUTCOME

- Terwujudnya kedisiplinan dan etos kerja pegawai.
  - Terciptanya peningkatan kinerja dengan tercapainya target kinerja.
  - Tercapainya agenda Reformasi Birokrasi dengan nilai A.
  - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai A
  - Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan) level 4.
- Tercapainya SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dengan nilai A.
- Tercapainya Tunjangan Kinerja 100%.



## PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

### JAGA JARAK

Tetap memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter saat berhadapan dengan orang lain.



### GUNAKAN MASKER

Saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. HINDARI tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

### CUCI TANGAN

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.



# AYO! PAKAI MASKER

## KENAKAN MASKER ANDA DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA

# CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI SENDIRI



Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut\*



Atau klik tautan (link) di bawah  
**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
<http://bit.ly/borangasukemas>

BANTU KAMI MEMBENAHAI LAYANAN  
DENGAN BERPARTISIPASI DALAM  
SURVEI BERIKUT



Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut\*



Atau klik tautan (link) di bawah  
**SURVEI KUALITAS PELAYANAN**  
<https://survei.balitbangham.go.id/ly/ROCP7k6H>